

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH****MEIRIANI ZALISFA****NIM : 11475205189**

**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : MEIRIANI ZALISFA  
 NIM : 11475205189  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN  
 PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI  
 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
 DI KOTA PEKANBARU

**DISETUJUI OLEH**

DOSEN PEMBIMBING

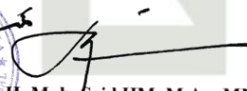
  
**DEVI DESWIMAR, S.Sos, M.Si**  
 NIK. 130 411 027

**MENGETAHUI**

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



  
**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara

  
**DR. KAMARUDDIN, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MEIRIANI ZALISFA  
 NIM : 11475205189  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN  
 PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI  
 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
 DI KOTA PEKANBARU  
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2019


**DISETUJUI OLEH :**

KETUA PENGUJI

  
Sahwitri Tyandani, SE, M.Si  
 NIP.19820806 200604 2 002

**MENGETAHUI**

PENGUJI I

  
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA  
 NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI II

  
Virna Museliza, SE, M.Si  
 NIK. 130 712 073

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim  
 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat  
 Dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan,  
 Kesehatan, dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

Alhamdulillah rabbil'alamin  
 Sebuah langkah usai sudah  
 Satu cita telah ku gapai.

Namun...

Itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari satu  
 perjuangan  
 Setulus hatimu ibu, searif arahanmu ayah  
 Doamu hadirkan keridhan untukku, petuahmu tuntunkan jalan ku  
 Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malam mu  
 Dan sebaith doa telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah.

Kini diriku telah selesai dalam studi sarjana

Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhan-Mu Ya Allah  
 Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, ayah...ibu...dan keluarga  
 ku tercinta mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara,  
 sungguh ku sayang kalian.

Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama  
 pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan  
 dan arahan kepada ku.

Terimakasih juga kupersembahkan kepada teman-teman yang  
 senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hari ku, berbagi  
 keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah. "tiada hari  
 yang indah tanpa kalian semua".

Aku belajar, aku tegar dan aku bersabar hingga aku berhasil.

Terimakasih untuk semua

Penulis,  
 Meiriani Zalisfa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU**

Oleh :

**MEIRIANI ZALISFA**  
**11475205189**

*Penelitian ini dilakukan di Unit layanan Perlindungan perempuan dan anak, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran unit layanan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan untuk mengetahui faktor penghambat peran unit layanan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada penelitian ini indikator yang digunakan berdasarkan peraturan walikota no 35 tahun 2016. Sejalan dengan penelitian ini maka informan dari penelitian ini adalah staf- staf anggota di unit layanan perlindungan perempuan dan anak kota pekanbaru. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara purposive sampling dimana melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis peran unit layanan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak dikota pekanbaru, adalah : keterampilan yang dimiliki konselor, mengetahui kebutuhan klien dan cara mengetahui reaksi emosi klien terhadap trauma, menumbuhkan rasa percaya diri pada korban, memberikan support, serta pemahaman agar korban mampu memahami keadaan hidup dan lingkungan. Selanjutnya, faktor penghambat unit layanan perlindungan perempuan dan anak kota pekanbaru, ialah : sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan masyarakat.*

**Kata Kunci : Unit Layanan PPA, Menangani, Kekerasan Perempuan Dan Anak**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum' Wr.Wb*

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah datang dengan Islam dan Al-Qur'an sebagai pedoman setiap insan yang senantiasa teguh dengan pendiriannya dalam melaksanakan ajarannya serta membimbing umat manusia menuju ilmu pengetahuan dan keimanan.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Starta Satu Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang peneliti tulis berjudul: ***“ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU”***

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan semangat dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

Teristimewa untuk ayahanda tercinta Amrizal dan untuk surgaku ibunda sri wahyuni, terimakasih yang tak terhingga buat ayah dan ibu yang selalu ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tak pernah mengenal lelah, senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Weni Puji Hastuti. S.Sos, MKP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Virna Museliza, SE, M,Si Selaku Dosen Konsultasi Proposal Yang Senantiasa Membimbing Dan Memberi Masukan Serta Arahan Yang Sangat Membantu Penulis Dalam Membuat Proposal.

Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si Selaku Pembimbing Skripsi Yang Senantiasa Membimbing Dan Memberi Masukan Serta Arahan Yang Sangat Membantu Penulis Dalam Membuat Skripsi.

Ibu Nurlasera, SE, M.Si Dan Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si Selaku Penasehat Akademik Penulis Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Yang Telah Banyak Membantu Dan Memberi Nasehat Motivasi Kepada Penulis Hingga Bisa Menyelesaikan Skripsi Penulis.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Kepada Seluruh Staf-Staf Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan seluruh instansi kelembagaan yang terlibat dalam penelitian ini.

Kepada semua keluarga besar tercinta terima kasih yang sebesar-besarnya, yang telah memberi dukungan dan do'anya.

Teman - teman seperjuangan Administrasi Negara C angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah telah berjuang bersama-sama walaupun kalian ada yang duluan tamat.

13. Sahabat-Sahabat Ku, Tiara Wulandari, Elis Farhana, Desy Susilawati, Desy Rahmawati, Ade Lilla, Wan Hayati Nupus, Putri Ayu Tirta. Terima Kasih Sebesar - Besarnya Atas Motivasi, Dukungan, Dan Masukan Kepada Penulis Sehingga Bisa Membantu Penulis Dalam Skripsi Ini Dan Terima Kasih Telah Menjadi Keluarga Penulis Di Pekanbaru.

14. Terima kasih kepada teman seperjuangan yori febrila, Mutiara elsa verina, yang telah membantu di setiap kesulitan yang di hadapi.

15. Seluruh Keluarga Besar KKN Kabupaten Siak Kecamatan Mempura Desa Kampung Tengah Angkatan 2017 Yang Menjadi Ikatan Persaudaraan Kepada, Bobby Kurniawan, Muh. Bobby A, Muh. Iqbal Maulana, Firdos Norfison, Isan, Ade Lilla, Wan Hayati Nupus, Putri Ayu Tirta, Fitri Azila, Firda Amelia, Winda Sari, Putryani Hennita. Terima kasih sebesar-besarnya atas masukan hingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terimakasih untuk Tante (long) Sri erni, SH, yang telah sedikit banyak membantu dalam menulis skripsi ini.

7. Buat semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu - persatu.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, sebagai modal penulis dimasa mendatang.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis,

**MEIRIANI ZALISFA**

**NIM. 11475205189**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Peran .....	13
2.2 Teori Kebijakan Publik .....	15
2.3 Konsep Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.....	20
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan .....	20
2.3.2 Anak .....	21
2.3.3 Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak .....	26
2.4 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak .....	29
2.5 Penelitian Terdahulu .....	30
2.6 Definisi Konsep .....	33
2.7 Konsep Operasional .....	34
2.8 Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	38



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Subjek Penelitian .....	39
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.6 Analisis Data .....	42

### BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Pekanbaru .....	44
4.2 Profil Unit Layanan PPA Kota Pekanbaru .....	48
4.3 Visi Dan Misi Pppa .....	49
4.4 Asas Dan Tujuan Unit Layanan PPA Kota .....	50
4.5 Tugas Dan Fungsi Unit Layanan PPA .....	51
4.6 Struktur Kepengurusan Unit Layanan PPA .....	60

### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru .....	61
5.2 Faktor Penghambat Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru .....	75

### BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan .....	79
6.2 Saran .....	81

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR TABEL

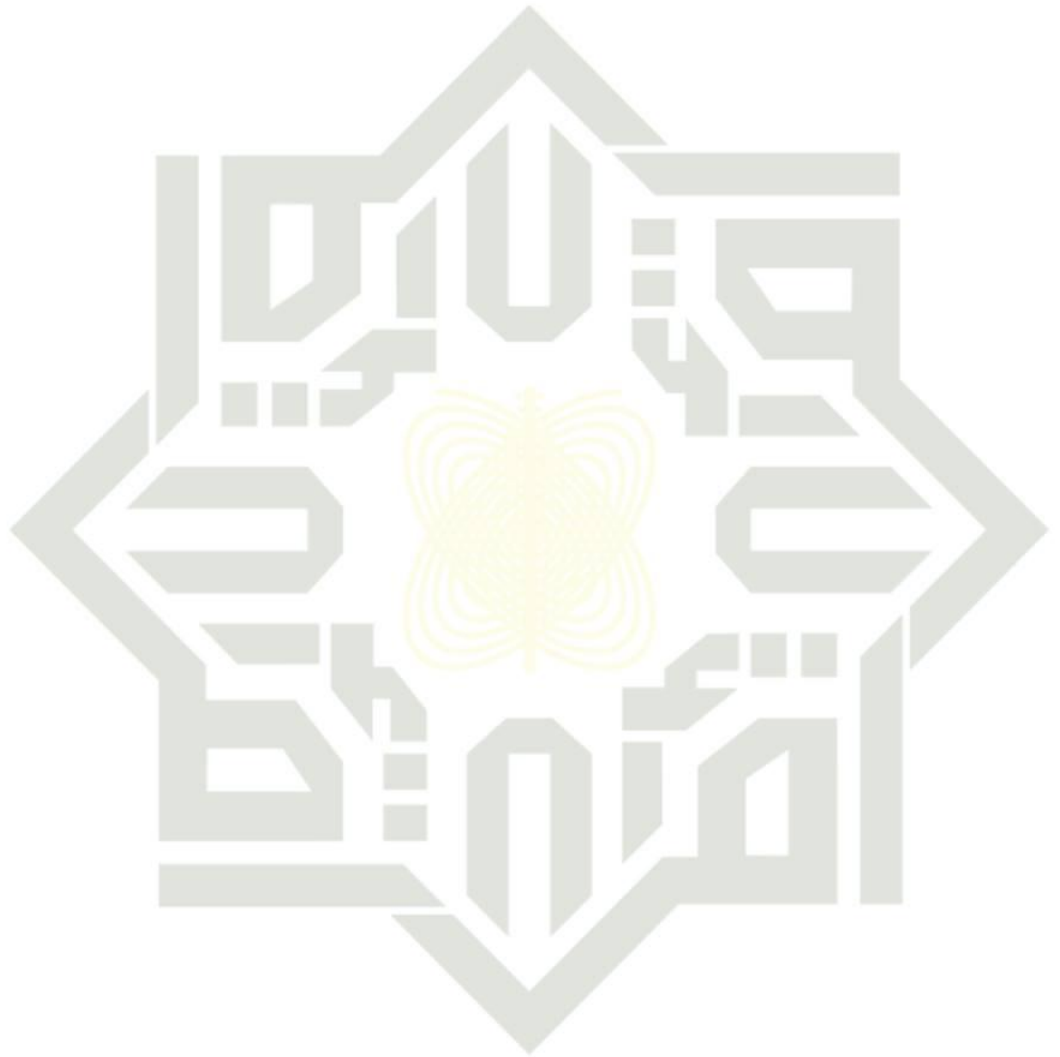
Tabel 1.1	Informasi Berita Kasus Kekerasan Di Kota Pekanbaru .....	4
Tabel 1.2	Data Kasus Kekerasan Yang Sudah Ditangani Pppa Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kasus .....	7
Tabel 1.3	Data Kasus Kekerasan Yang Sedang Ditangani Pppa Kota Pekanbaru Januari S.D September Berdasarkan Jenis Kasus .....	8
Tabel 2.1	Indikator Penelitian .....	35
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	40
Tabel 4.1	Struktur Kepengurusan.....	60

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian .....	36
Gambar 5.1	Alur Pelayanan Penanganan Korban Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.....	78



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan sosial, seperti Yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi yang pada akhirnya telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak.

Kesejahteraan Anak menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Adapun kesejahteraan anak itu sendiri menurut Arif Gosita adalah : “Hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap peserta bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan adalah manusia berjenis kelamin betina. Berbeda dengan wanita, istilah “perempuan” dapat merujuk kepada orang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Awalnya hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam menjalani perintah Tuhan di dunia ini. Kasus kekerasan dapat terjadi pada siapa saja termasuk anak dan perempuan. Kekerasan atau bahasa inggrisnya violence berasal dari bahasa latin : violentus yang berasal dari kata vi atau vis berarti kekuasaan atau berkuasa adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.

Keragaman jenis : Kekerasan yang dilakukan oleh perorangan, perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik ( kekerasan fisik ), verbal ( termasuk menghina ), psikologis ( pelecehan ), oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok, kekerasan yang tercantum dalam hukum publik, kekerasan dalam politik, kekerasan simbolik. Kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran ( penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, hingga batas tertentu – kepada binatang dan harta benda. Istilah “kekerasan” juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. (Wikipedia)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sumber penelitian yang saya temukan dari informasi berita, sebanyak 55 kasus kekerasan terjadi di kota pekanbaru. Jumlah tersebut terhitung sejak januari hingga juli 2019. Parahnya dari jumlah tersebut kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak terhadap anak di kota pekanbaru. Konselor Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas PPPA Kota Pekanbaru. Herlia Santi, merincikan kasus :

**Tabel 1.1**  
**Informasi Berita Kasus Kekerasan Di Kota Pekanbaru :**

Kasus	Jumlah
Kasus Pencabulan	26
Hak Asuh Anak	10
KDRT	5
ABH	9
Pelantaran	2
Kekerasan Diluar Rumah Tangga	3
<b>Jumlah</b>	<b>55</b>

Sumber : <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/07/24>

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di Bentuk Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Adalah Unit Layanan yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Anak mempunyai tujuan, tugas dan fungsi yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan umum dibentuknya Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan anak adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.
2. Tujuan khusus dibentuknya Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak adalah :
  - a. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan.
  - b. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak meliputi pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, dan sebagainya, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang dikelola masyarakat secara mandiri dan disesuaikan dengan hal sebelumnya, dan
  - c. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam rangka terbangunnya kerjasama /kemitraan yang dapat mendukung keberadaan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas :

Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas memberikan pelayanan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak.

Fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. penyediaan dan / fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang
- c. kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan walikota pekanbaru nomor 107 tahun 2019 tentang pembentukan pengurus Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru. Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru dibawah koordinasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Pekanbaru. Adapun bentuk Pelayanan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak kota pekanbaru meliputi :

1. Pelayanan, pemulihan, dan kesehatan.
2. Pendampingan dan advokasi.
3. Pendidikan dan penelitian.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penguatan jaringan dan kelembagaan.
5. Pendataan dan pelaporan.

Pelayanan yang diberikan oleh PPPA Kota Pekanbaru bersifat terbuka.

Layanan ini selalu siap menjaga kerahasiaan setiap korban yang terkena kasus kekerasan pada perempuan dan anak - anak.

**Tabel 1.2**  
**Data Kasus Kekerasan Yang Sudah Ditangani PPPA**  
**Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kasus**

No	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	KDRT	15	12	17	44
2	Kekerasan Berbasis Gender	3	2	7	12
3	Kekerasan Terhadap Anak	4	6	12	22
4	Penelantaran	4	8	3	15
5	Hak Anak	7	2	17	26
6	Hak Asuh Anak	7	14	4	25
7	ABH	0	4	4	8
8	Kenakalan Anak	6	5	2	13
9	Pencabulan	14	21	42	77
10	Trafficking	3	0	0	3
Jumlah		63	74	108	245

**Sumber : PPPA Kota Pekanbaru, 2019**

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui banyaknya kasus-kasus di seputar perlindungan perempuan dan anak, maka Pemerintah Propinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi rakyatnya dari praktek yang tidak bertanggung jawab serta berupaya untuk mencegahnya dengan berbagai program dan kebijakan, mengingat akibat yang ditimbulkan akan merusak masa depan generasi bangsa yang seharusnya menjadi potensi untuk pembangunan daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Data Kasus Kekerasan Yang Sedang Ditangani PPPA**  
**Kota Pekanbaru Januari S.D September Berdasarkan Jenis Kasus**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	KDRT	12
2	Kekerasan Berbasis Gender	5
3	Kekerasan Terhadap Anak	9
4	Penelantaran	2
5	Hak Anak	18
6	Hak Asuh Anak	2
7	ABH	16
8	Kenakalan Anak	0
9	Pecabulan	32
10	Trafficking	0
11	Pecabulan (Saksi)	1
Jumlah		97 kasus

**Sumber : PPPA Kota Pekanbaru, 2019**

Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantau dan evaluasi.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang –undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga. Berdasarkan undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang –undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak maka penulis memperoleh kesan kebijakan tersebut kurang berjalan.

Dapat dilihat dari pembahasan diatas dapat dilihat permasalahan yang terjadi yaitu : Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, khususnya di kota Pekanbaru. Dan karena masih minimnya kemauan masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya disebabkan mereka beranggapan bahwa urusan intern tidak perlu dicampuri pihak lain.

Berdasarkan fenomena yang ada di latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Penghambat Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kota Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Seiring perumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk Mengetahui Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

- 1) Manfaat teoritis
  - a. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru.
  - b. Dapat dipergunakan untuk menambah khasanah perpustakaan.
- 2) Manfaat praktis
  - a. Bagi instansi pemerintah dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan terutama dalam Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi para peneliti yang berminat untuk meneliti tentang Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kota Pekanbaru dimasa yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini, penulis membaginya ke dalam enam bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai faktor yang mempengaruhi peranan organisasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pandangan islam, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, Definisi Konsep, Konsep operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

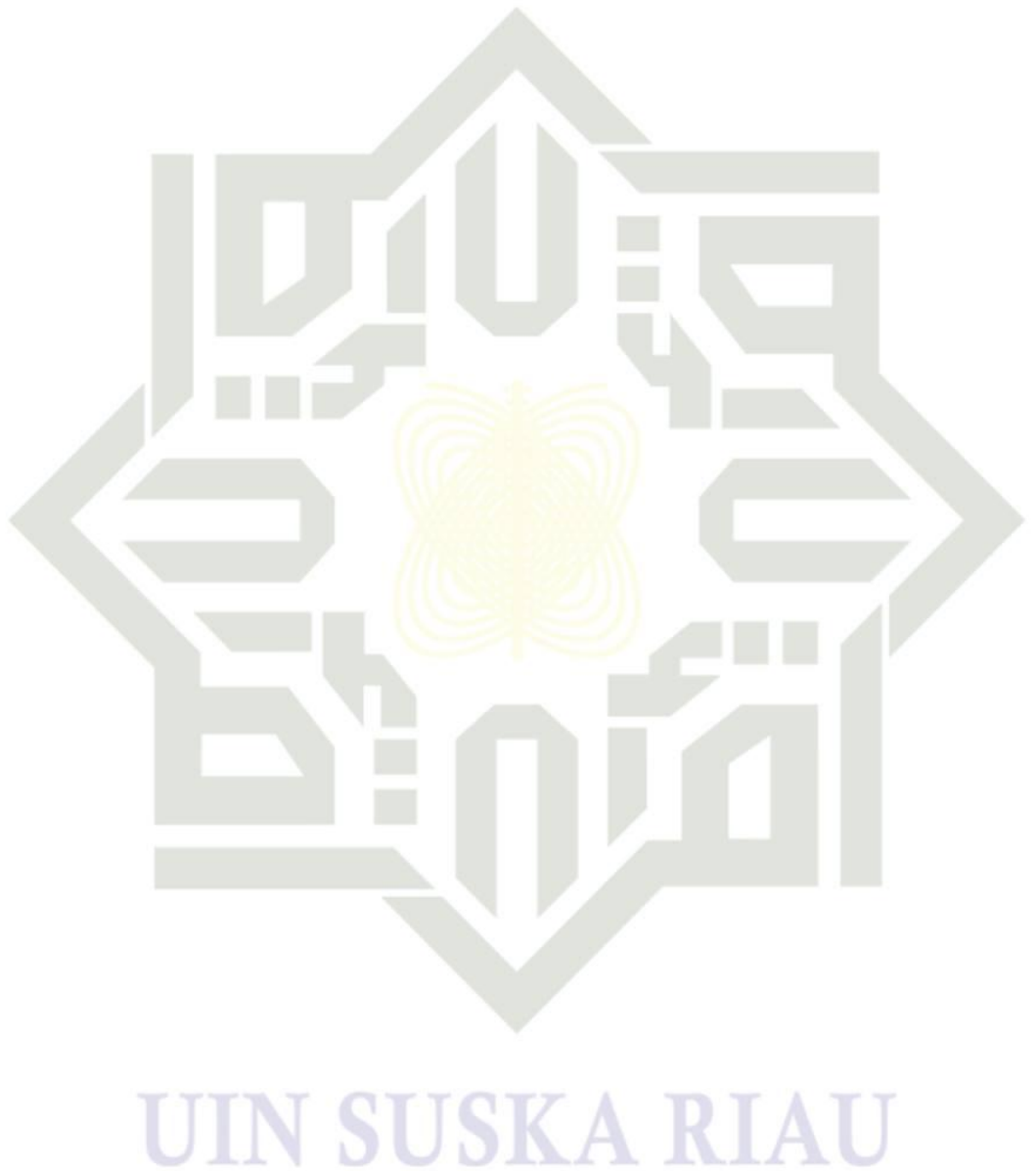
Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan penelitian dalam mengukur peran dilokasi penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Peran

Secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.

Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
  - a. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengertian menurut Biddle dan Thomas (2005: 218)

Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

- 2) Pengertian menurut Soejono Soekanto (2009: 212-213)

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

- 3) Pengertian menurut R.Linton

Peran adalah *the dynamic aspect of status*. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya.

- 4) Pengertian menurut Merton ( 2007: 67 )

Pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.

- 5) Pengertian menurut King

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial.

- 6) Pengertian menurut Palan

Peran adalah merujuk pada hal yang harus dijalankan seseorang di dalam sebuah tim.

- 7) Pengertian menurut Alo Liliweri

Peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pengertian menurut Paula.J Christensen dan Janet W. Kenney

Peran adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan anggota lainnya.

- 9) Pengertian menurut Donna L. Wong

Peran adalah kreasi budaya, oleh karena itu budaya menentukan pola perilaku seseorang dalam berbagai posisi sosial.

- 10) Pengertian menurut Sri Saptina H, Dwi Nugroho, dan Aris Sutardi

Peran adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka kata peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan.

#### Teori Kebijakan Publik

Secara umum dalam (Tangkilisan: 2008: 3) kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Sedangkan menurut Eulau yang dikutip Jones (1985: 47) dikatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen *public policynya* (Jones: 1985: 48-49) yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Intentions, yaitu niat/tujuan dari sebenarnya dari kebijakan.
- b. Goal, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak di capai.
- c. Plans of proposals, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
- d. Program, yaitu program yang di sah kan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- e. Decision or choices, yaitu keputusan atau pilihan atau tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- f. Effect, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat di ukur.

Anderson dalam (Arifin: 2014: 21), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan (policy) menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

Kraft dan Furlong dalam (Riant Nugroho: 2015: 105) menyebutkan bahwa kebijakan publik tidak dibuat dalam waktu vakum, kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Solichin (2014: 40), Menurut Ericson dalam tulisannya, *“the policy analisis role of the contemporary university,”* merumuskan analisis kebijakan publik sebagai berikut:

*“...public policy analysis is a future-oriented inquiry into the optimum means of achieving a given set of social objectives”* (penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan).

William N. Dunn (2003: 95) mendefinisikan analisis kebijakan merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

Edi Suharto (2006: 44), mengatakan untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan tersebut diantaranya:

- a. Tindakan pemerintah yang berwewenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk menjelaskannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Leo Agustino (2014: 8), mengemukakan terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan publik berisi tindakan atau pola tindakan pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Hogerweft dalam (Faried Ali: 2012: 15) kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini memperlihatkan adanya kandungan empat unsur pokok yaitu:

- a. **Unsur usaha**, dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha mana bisa dalam bentuk tindakan (kelakuan atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran seperti pendapat atau gagasan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. **Unsur tujuan**, sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh perilaku non pemerintah.
- c. **Unsur sarana**, begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan anatara lain, tentang besar atau luasnya sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai.
- d. **Unsur waktu**, adalah dimaksudkan sebagai sesuatu keadaan yang berkenaan dengan jangka waktu pencapaian tujuan, penggunaan sarana dan kegiatan dalam upaya yang dilakukan. Waktu dalam isi kebijakan selalu berkaitan dengan tiga unsur lainnya dan selalu terkait dengan kecepatan terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan.

Dari pengertian kebijakan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang merupakan tindakan tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan, dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya menurut Hoogerweft dalam (Faried Ali: 2012: 16) yaitu:

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator).
2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai koordinator).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi alokasi).

### 2.3 Konsep Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

#### 2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) dalam Suwatno (2011:182) Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan *ber-* menjadi ‘berdaya’ artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu.

Pemberdayaan dikutip dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*, menurut Stewart (2008:18) dalam Suwatno (2011:182) yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Usman (2004) dalam Zaili Rusli (2012:34) mengatakan pemberdayaan mengandung makna adanya aktivitas/usaha untuk menjadikan sesuatu dari keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga, atau kuat.

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Memahami konsep empowerment secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Menurut HAW Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat secara maksimal untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri agar masyarakat dapat bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik (Peraturan Gubernur Riau Nomor: 21 tahun 2011).

Pemberdayaan perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.

#### 2.3.2 Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan keturunan antara ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah maupun tidak. Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan menghasilkan keturunan yang berkembang sehingga membentuk silsilah keluarga.

Pengertian anak berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah keturunan sebagai korelatif dari orang tua yang berarti putra atau putri dari ayah dan ibu. Di dalam keluarga, anak merupakan hal yang sangat berharga bagi orang tua. Setiap orang tua yang baik, pasti merawat, menjaga, membimbing, serta mendidik anaknya sebaik mungkin agar menjadi anak yang berguna bagi semua orang. Kita perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

1) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*)

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Namun, diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak di bawah umur. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Pasal 45 KUHP adalah pasal yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Namun, ketentuan tersebut dicabut dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3) Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata)

KUHPerdata mengatur tentang batasan umur bagi orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

#### 4) UNICEF ( *United Nations Emergency Children's Fund* )

UNICEF merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang didirikan pada 11 Desember 1946 untuk memberi bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup akibat dari perang dunia ke II. UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.

#### 5) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Aspek sosiologis pengertian anak menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial paling kecil di masyarakat. Arti anak dari aspek sosial ini mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berinteraksi dengan orang dewasa.

Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa: disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.

Dalam psikologi perkembangan anak banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Proses-proses perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama ia masa anak-anaknya secara sedikit demi sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Dengan tumbuhnya sang anak, maka sang anak tersebut akan terus menjajagi sampai sejauh mana lagi orang tua mereka bisa mentolerir tindakannya dan hal inilah yang membutuhkan penilaian kembali oleh orang tua.

Mereka juga merasa bahwa mereka masih harus mentes ketegasan orang tua mereka, sampai sejauh mana orangtuanya masih bisa bertahan terhadap tingkah laku mereka sendiri. Para orang tua yang tadinya hanya bersikap sebagai seorang sahabat, mau tak mau akan terbentur pada persoalan yang demikian. Pada akhirnya para orang tua ini harus bersikap tegas, setidaknya mulai dari saat-saat tersebut, atau akhirnya mereka akan kehilangan kesabarannya dan menjadi marah.

Kenyataan-kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak-anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “hak asasi anak harus diusahakan bersama.” Pandangan anak dari pengertian religius akan dibangun sesuai ajaran agama, anak mendapat kedudukan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istimewa. Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk disayangi dan dididik. Didalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu.

Pengertian serta definisi perlindungan menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) maknanya adalah tempat berlindung atau memperlindungi. Perlindungan merupakan tempat berlindung dari tindakan yang merugikan. Perlindungan ada untuk melindungi suatu hal karena ketidakmampuan untuk melindungi diri sendiri. Sebagai contoh perlindungan anak, anak perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah, keluarga, masyarakat, serta orang tuanya dalam masa pertumbuhannya agar tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya.

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri dan dapat perlindungan.

### 2.3.3 Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence* pengucapan bahasa Inggris: [/vaɪ(ə)ləns/] berasal dari (bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan *kewenangannya* yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini.

Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalannya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan dan anak dimana saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga.

Adapun jenis - jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Nurdjunaida dalam Harnoko (2010:184) dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Kekerasan Fisik Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan dan anak, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.
- b. Kekerasan Psikologis/Nonfisik Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan Seksual Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.

Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual. Kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi di dalam rumah tangga, Soeroso (2010:80). Adapun bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi diantaranya:

- a. Kekerasan fisik yakni: pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan.
- b. Kekerasan nonfisik yaitu: penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.
- c. Kekerasan seksual meliputi: pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi dan memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kekerasan ekonomi berupa: tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan.

### 2.4 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia mengandung ajaran yang memberikan tempat terhormat bagi perempuan, hal ini tercantum dalam surat an- Nahl ayat 97, Allah berfirman :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-Nahl : 97)

Didalam al-Qur’an juga digambarkan bahwa hubungan timbal balik antara Suami Istri bagaikan satu jiwa dalam dua tubuh, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايٰتِهٖۤ اَنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةًۭۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantaranya tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan atas hak perempuan atau penzaliman atas perempuan demi kepentingan kaum laki-laki sebab Islam adalah syari'at Allah yang diturunkan untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Oleh sebab itu peran perempuan sebagai istri yang mendampingi suami, tidak kalah pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Apabila istri mampu melaksanakan peranannya sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syari'at Islam, maka ia telah melaksanakan berbagai kegiatan ibadah yang akan mengantarkan ke arah kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Secara bathiniah, Islam adalah agama keadilan dan anti kekerasan. Pesan demikian yang terlihat dari rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan mengapa agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia dimana agenda utamanya adalah menekankan persoalan jaminan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Memang, pada satu sisi kita bisa mengatakan bahwa realitas sosial yang tidak menguntungkan kaum perempuan tersebut terkait dengan terlalu dominannya budaya *patriarki*. Oleh karena itu, memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan dalam konsepsi kemasyarakatan adalah penting. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat harkat martabat perempuan diantaranya adalah dengan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan.

#### Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang sejenis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru. Walaupun lokus dan masalahnya tidak sama persisi tetapi sangat membantu peneliti dalam menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Puji Nurhaya, Program Studi Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2009. Dengan judul Skripsi Kinerja Organisasi Lembaga Legislatif (Studi: Analisis Kinerja DPRD Kota Medan Periode 2004-2009. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kota Medan Periode 2004-2009 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas. Rendahnya Kinerja DPRD Kota Medan ini dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yaitu sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia yaitu pendidikan dan pengalaman, serta faktor informasi yaitu sumber informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi, serta intensitas menyerap aspirasi masyarakat yang dimiliki oleh DPRD Kota Medan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata faktor anggaran dan pembiayaan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Medan.

Dalam peran serta pemberdayaan DPRD untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPRD Kota Medan dimasa yang akan datang, perlu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan pengenalan dan orientasi melalui pelatihan/kursus terhadap sistem persyaratan anggota legislatif melalui partai politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Sukowati, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta pada Tahun 2010. Dengan judul Tesis Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sregan. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi di Kantor Kecamatan Kedawung pada dasarnya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal Ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tingkat kepekaan tugas pekerjaan dengan hasil yang dicapai, dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak serta konsistensi antara tugas dan fungsi masing-masing seksi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kedawung dan pertanggungjawabannya terhadap pemberi kebijakan.

Sedangkan tingkat kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat keefektifan sudah cukup tinggi. Untuk meningkatkan kinerja perlu dilaksanakan diklat-diklat yang menyangkut hal-hal yang bersifat khusus serta kesadaran yang tinggi dari aparat di Kantor Kecamatan Kedawung dalam pemahaman tugas dan fungsinya serta pemahaman yang tinggi tentang kondisi wilayah dalam menentukan program dan arah kebijakan.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Merry Dandian Panji, Program Studi Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Indonesia,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta pada Tahun 2002. Dengan judul Tesis Analisis Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan Balanced Scorecard. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa hasil penelitian atau kepuasan pelanggan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ( Ditjen Dikti ) ternyata baik. Kepuasan kerja tangible ternyata sedang dan kepuasan kerja intangible umumnya rendah. Sebagian karyawan tidak memahami visi dan misi Dirjen Dikti tetapi mereka tetap bekerja sebaik mungkin. Dengan menerapkan Balanced Scorecard memaksa organisasi menjaga keseimbangan antara perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, proses internal organisasi, efisiensi keuangan yang telah dialokasikan, kesesuaian antara rencana-rencana dan operasional dan perspektif kepuasan pelanggan/konsumen tercapai dengan adanya keterlibatan masyarakat untuk kemajuan dunia pendidikan.

#### 2.6 Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Adalah Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto 2002 : 243).
2. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud. (Leo Agustino 2006:7)

3. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.
4. Anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.
5. Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi social dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

#### 7 Konsep Operasional

Adapun Konsep Operasional yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Penelitian**

Konsep Penelitian	Indikator
Tugas dan Fungsi Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.(Perwako Pekanbaru, No 35 Thn 2016.)	1. Melaksanakan kegiatan koordinasi. 2. Penyediaan atau fasilitas. 3. Kerjasama dan kemitraan.

*Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru, Nomor 35 Tahun 2016.*

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah sebagai perangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena dan bertujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Kerangka berpikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Teori dipergunakan untuk memperjelas suatu masalah yang diteliti dan untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis serta membantu atau membimbing peneliti dalam penelitiannya. Menurut Kerlinger dalam Rakhmat (2004 : 6) teori adalah himpunan konsep (konstruk), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandang sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Dalam penelitian ini menjadi fokus penelitian adalah Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan mencari dan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

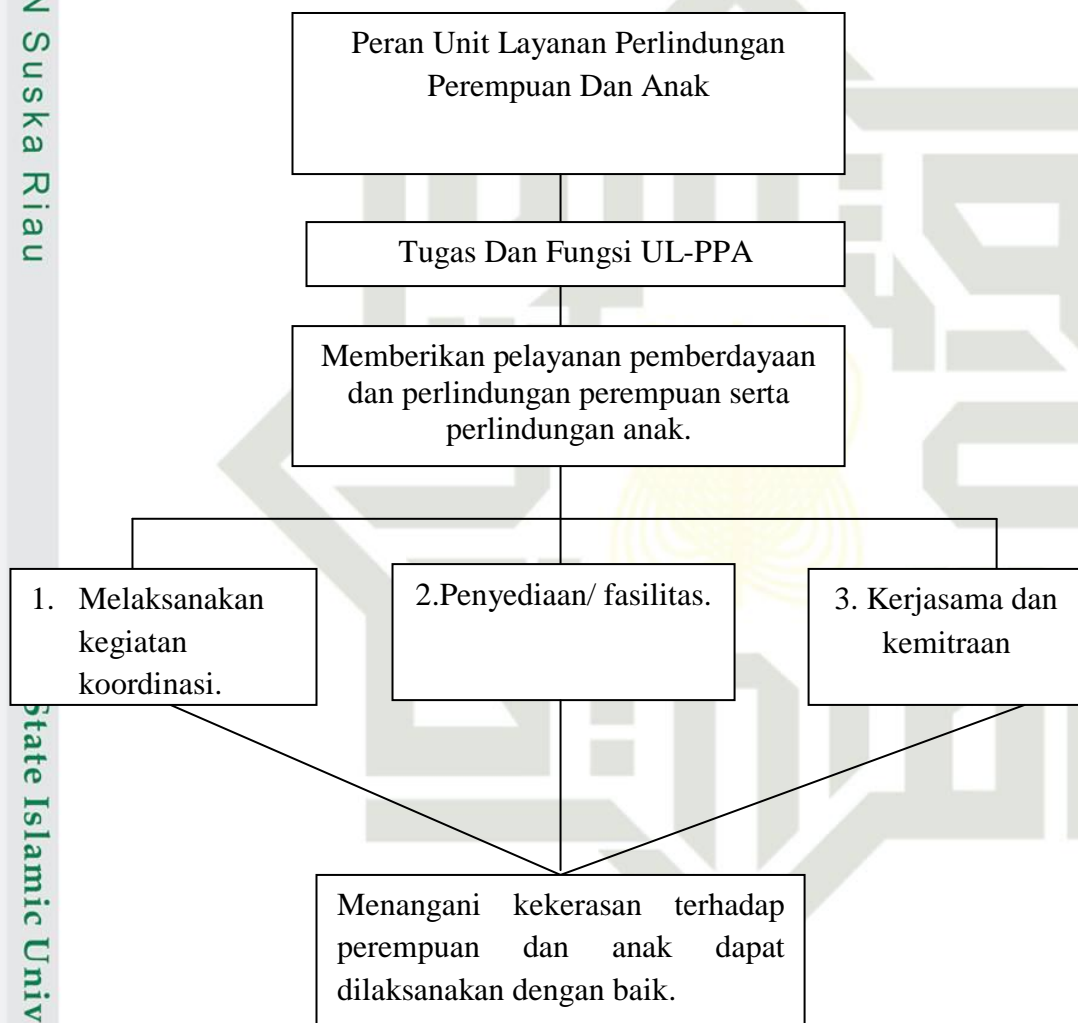
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok pikiran dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang diteliti. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru, nomor 35 tahun 2016.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Didalam penelitian ini juga terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi dan bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini juga hanya mendeskripsikan informasi yang ada secara objektif (Sugiono dalam Harbani Pasolong, 2013:75-76).

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Masjid Ar-Rahman Lantai 2 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu dimulai Oktober-November 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Adapun jenis data yang penulis gunakan adalah jenis Kualitatif. Dalam buku Sugiyono (2011: 156 ) Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, actual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dan informan.

#### **2. Sumber Data**

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevan dan lengkap. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang berkaitan dengan objek penelitian, yang didapatkan ketika peneliti terjun kelapangan, baik berupa wawancara, serta pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya dengan pihak informasi yang dalam hal ini adalah pejabat yang bertugas di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku atau data-data yang telah diolah, seperti data pelengkap buku-buku, termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2002:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta lapangan.

Berdasarkan penjelesan tersebut, maka penentuan subjek digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informan* dilakukan dengan cara *purposive sampling*. seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2010: 85) bahwa, *teknik purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Perangkat Instansi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Informan telah lama terlibat dengan kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran
3. Informan yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk diminta keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Kemudian informan yang ditetapkan oleh peneliti selanjutnya adalah masyarakat Kota Pekanbaru dengan kriteria sebagai berikut:

1. informan memiliki usia minimal 18 Tahun
2. informan terkait dengan aktivitas atau kegiatan yang menjadi sasaran
3. informan mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 6 orang .

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Kepala Seksi /Kabid	2
3	Konselor	2
	Psikologi	1
<b>Total</b>		<b>6</b>

*Sumber : Data Olahan 2019*

#### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, karena setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Observasi

Usman (2009: 52) mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis melakukan observasi langsung dilapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan, alat pengumpulan datanya disebut observasi. Dalam melakukan pengamatan langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informan yang akurat dengan menggunakan pedoman observasi. Dalam penelitian akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi secara langsung Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

#### b. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan key informan, secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Dinas, Bidang, dan orang-orang tertentu terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

#### c. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian.

Dokumen yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan di lapangan.

### 3.6 Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles Dan Huberman dalam Sugiyono (2012 : 246) mengungkapkan bahwa dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono: 2012: 247). Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan yang mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut. Semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Profil Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, Indonesia. Pekanbaru dikenal dengan nama Kota Bertuah yang merupakan singkatan dari Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, Dan Harmonis yang merupakan slogan Ibu Kota Bumi Melayu Lancang Kuning dalam mencapai tatanan kota yang lebih baik. Pekanbaru juga dikenal sebagai Kota Melayu, karena Pekanbaru merupakan garda utama di Provinsi Riau khususnya dan Indonesia umumnya dalam hal menjaga dan melastarikan kebudayaan melayu yang menjadi visinya di tahun 2021. Pekanbaru mempunyai dua Pelabuhan Sungai Duku, Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Serta Satu Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Daerah ini merupakan lading yang lambat laun berubah menjadi daerah perkampungan kemudian Perkampungan Senapelan pindah ke daerah yang baru yaitu Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak. Namun, nama Payung Sekaki tidak dikenal pada masanya dan tetap disebut sebagai Senapelan.

Sultan Sri Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mendirikan istana dikampung bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Sultan pun memiliki insiatif untuk mendirikan sebuah pecan di senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis sang sultan pun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah Datuk empat suku ( Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, Dan Kampar) Nama Senapelan diganti menjadi Pekanbaru. Pada saat ini 23 Juni di peringati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Setelah terjadi pergntian nama, Senapelan mulai di tinggalkan dan mulai diganti dengan nama Pekanbaru dalam penyebutan sehari-hari.

Berdasarkan surat keputusan kerajaan, pekanbaru menjadi bagian dari kesultanan siak dengan sebutan distrik. Pada tahun 1931 pekanbaru di masukkan di wilayah Kampar kiri yang dikepalai oleh seorang controleor. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 Maret 1946 Pekanbaru dikepalai seorang Gubernur Militer yang disebut Gokung.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketepatan gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1746 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan sebagai daerah otonom yang disebut Hominte Atau Kota Besar. Setelah itu berdasarkan UU No 22 Tahun 1948, Kabupaten Pekanbaru diganti menjadi Kabupaten Kampar Dan Kota Pekanbaru di berikan status kota kecil dan status ini semakain di sempurnakan dengan keluarnya UU No 08 Tahun 1856. Kota Pekanbaru dinaikkan dari kota kecil menjadi kota praja setelah keluarnya UU No 01 Tahun 1957. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 52/144-25 Tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Letak Geografis

### a. Letak Dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara garis 101,14` - 101,34` bujur timur dan 0,25` - 0,45` lintang utara. Dengan ketinggian dari laut berkisar 5-50 meter.

### b. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah pula oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat Ke Timur. Kota Pekanbaru memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limao, Tampan Dan Sungai Sail. Sungai siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara antara 34,1 °C - 35,6 °C dan suhu minimum 20,2 °C - 23,0 °C.

## 3. Pemerintahan

Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Pemerintahan oleh Pembangunan menjadi harapan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan social, ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

#### a. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru

Menurut surya (2005:229), visi organisasi merupakan arah yang menentukan arah organisasi kemana akan dibawa dan apa yang diinginkan organisasi/perusahaan kedepan. Visi organisasi harus dirumuskan secara tepat dan jelas serta mudah dipahami oleh semua anggota organisasi/perusahaan. Visi merupakan pedoman tindakan sehari-hari para manager dan anggota yang menjadi basis untuk menjaga jangan sampai organisasi menjadi kandas ditengah gelombang ketidakpastian. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru.

Visi Kota Pekanbaru ialah :

“terwujudnya kota pekanbaru sebagai pusat perdagangan dn jasa pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”

Misi :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Meningkatkan infrakstur perkotaan, system transportasi yang memadai dan kualitas dan lingkungan kota serta penataan ruang yang terintegrasi.
3. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan social.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan berperilaku sehat.

Kota pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang terus berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan kota pekanbaru dapat dilihat infrastruktur yang ada, bahkan kota pekanbaru tahun 2010 telah menjadi kota ketiga berpenduduk sebanyak dipulau sumatera, setelah medan dan Palembang. Kota pekanbaru terdiri dari 12 ( dua belas ) kecamatan sedangkan jumlah kelurahan sebanyak 58 (lima puluh delapan).

#### 4.2 Profil Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah dibentuk Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di kota pekanbaru. Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan walikota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru dibawah koordinasi Dinas PPPA yang kegiatannya meliputi :

1. Penanganan Pengaduan
2. Pelayanan Kesehatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rehabilitas Social
4. Penegakan Dan Bantuan Hukum
5. Pelayanan Pemulangan Dan Reintegrasi Social
6. Rumah Aman (Shelter) melalui rujukan secara gratis

#### 4.3 Visi dan Misi PPPA

##### a. Visi

Optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan.

##### b. Misi

1. Menjadikan PPPA sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu.
2. Membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak.
3. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
4. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.4 Asas Dan Tujuan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

#### a. Keimanan Dan Kemanusiaan

Sebagaimana nilai- nilai yang terdapat didalam agama bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara baik dan manusiawi, oleh sebab itu, setiap lembaga pelayanan harus mengedepankan hak asasi manusia dan melaksanakan proses pelayanan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

#### b. Keadilan Sosial

Keadilan social merupakan hak semua orang, termasuk hak perempuan dan anak. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak, dan perlindungan.

#### c. Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Gender

Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya dalam menerima suatu pelayanan yang sifatnya umum seperti : pendidikan, kesehatan, penghidupan yang layak, dan perlindungan hukum. Baik laki-laki, perempuan, maupun anak- anak semua sama-sama berhak mendapatkannya.

#### d. Keterpaduan Dan Kemitraan

Pelayanan yang ada di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru tidaklah incidental melainkan sudah dipadukan mulai dari disiplin ilmunya, lembaga pelaksana pelayanan, program-program, sampai dengan para pelaksananya, sehingga membentuk satu-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan yang utuh dimana sama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

e. Keterbukaan Dan Akuntabilitas

Siapaapun boleh mengakses dan mendapat pelayanan dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru. Untuk pendanaan dan program- program pun secara rutin dilaporkan kepada Pemda Provinsi Kota Pekanbaru.

f. Profesionalitas

Artinya, semua hal yang ada dalam Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan pelayanan sampingan, melainkan pelayanan yang utama dan terpadu.

g. Keberlanjutan Dan Pemberdayaan

Maksudnya disini setiap pelayanan terus dilakukan walaupun klien sudah merasa cukup dan kembali kepada kehidupannya. Hal ini dapat dilihat karena masih adanya pemantauan secara berkala dan pemberian keterampilan.

#### 4.5 Tugas Dan Fungsi Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

##### 1. Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan lainnya.

Fungsi :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;
- b. Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Perumusan penetapan kinerja unit kerja;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dinas secara berkala;
- i. Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan penilaian hasil prestasi kerja bawahan;
- k. Pengelolaan keuangan dinas;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Tugas:

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bidang Pengarusutamaan Gender

Tugas :

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender.

Fungsi :

Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

**4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Tugas :

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perlindungan perempuan dan anak.

Fungsi :

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Tugas :

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak.

Fungsi :

Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- h. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- i. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- j. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k. Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

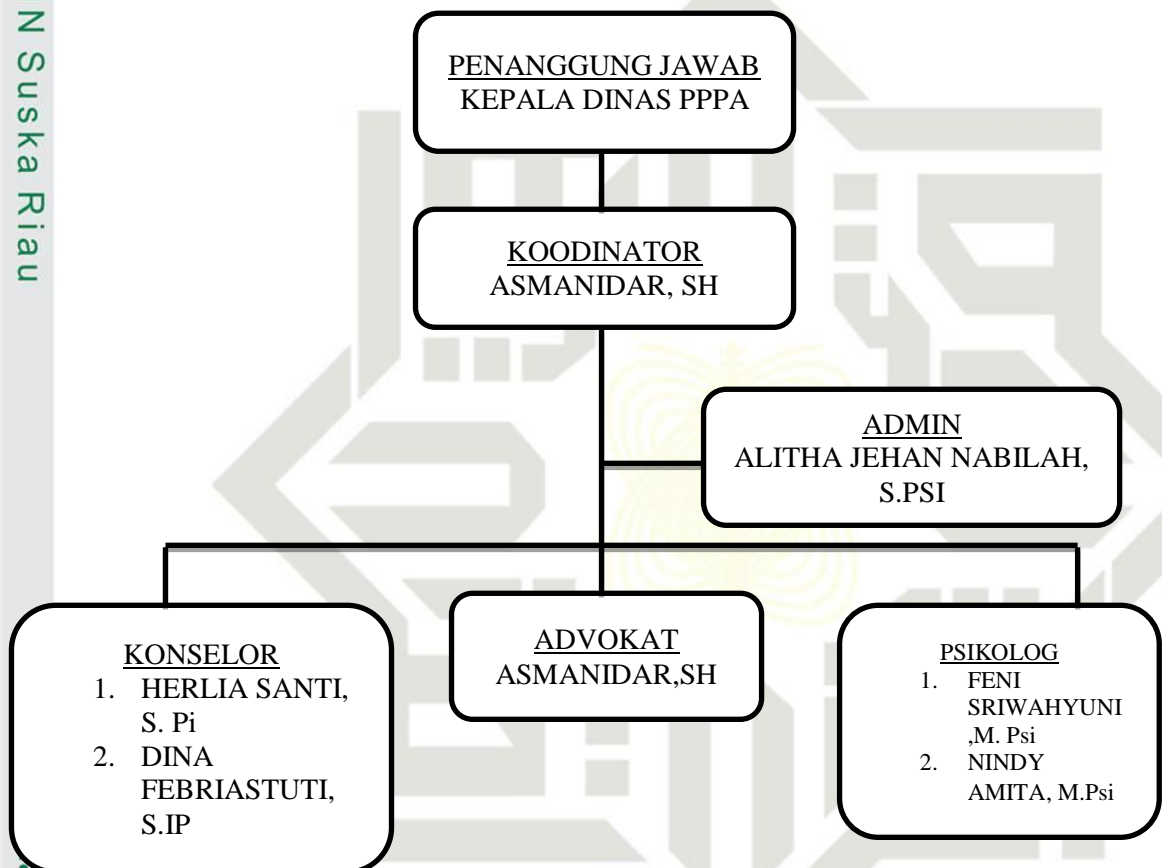
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- o. Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- p. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.6 Struktur Pengurus Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

**Tabel : 4.1**  
**Struktur Pengurus Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru**



*Sumber : keputusan walikota pekanbaru, nomor 107 tahun 2019.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru diantaranya :

1. Analisis peran unit layanan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru dilaksanakan melalui tahap tahap yaitu tahap awal sebelum melaksanakan proses konseling adalah berupa Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien (rapport). Tahapan inti meliputi gambaran masalah yang dihadapi dengan menggunakan asesmen atau pemeriksaan, yaitu pemeriksaan psikologis berupa taraf kecerdasan sosial dan emosional tahapan akhir yaitu penilaian dan tindak lanjut dengan melakukan pendampingan psikologis menggunakan metode play therapy yaitu dengan cara bermain, dengan adanya peran konselor menunjukkan adanya perubahan terhadap masalah yang dihadapi anak dan perempuan korban kekerasan serta kemampuan dalam pengambilan keputusan dan dalam menunjukkan kepercayaan diri dari cara berinteraksi dengan lingkungan sosial melalui pengembangan bakat minat dan potensi yang dimilikinya maka dapat dikatakan konselor berperan dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak dan perempuan korban bermain .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menganalisis bahwa untuk melihat perubahan pada masa depan klien memerlukan pihak yang banyak dalam proses pemulihan klien tidak hanya sebatas adanya peran konselor dalam proses konseling yang dilakukan akan tetapi dalam hal ini keluarga juga berperan dalam pemulihan trauma yang dihadapi klien anak dan perempuan korban kekerasan, karena pada dasarnya keluarga yang mengajarkan dan melindungi anaknya dan perempuan, kemudian lingkungan dan juga pemerintah juga berperan dalam pemulihan dampak yang dialami klien korban kekerasan agar permasalahan kasus kekerasan tidak terjadi lagi

2. Faktor Penghambat Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Yaitu :

- a. Faktor sarana dan prasarana, yaitu kurangnya akses untuk pelayanan online untuk mengetahui instansi unit layanan perlindungan perempuan dan anak
- b. Faktor sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap petugas untuk menangani masalah anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan khusus.
- c. Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa anak di bawah umur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan :

1. Dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, konselor harus benar-benar berperan aktif dalam pencegahan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak tersebut.
2. Kepada unit layanan perlindungan perempuan dan anak kota Pekanbaru dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak adanya semakin meningkatkan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan kesadaran bagi orang tua serta seluruh masyarakat untuk lebih menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
3. Serta kepada seluruh seluruh negara dan pemerintahan terutama pemerintahan Indonesia, hendaknya lebih memberikan sanksi yang sebesar-besarnya kepada pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan sehingga perempuan dan anak bisa terlindungi dari tindak kekerasan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Shaleh. 2008. *Psikologi suatu pengantar dalam perspektif islam*. Jakarta : Kencana.
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- Djama'an Satori. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Kumorotomo , Wahyudi. 1996. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias. 2006. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Ratminto, dan Winarsih, Atik Septi. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rosadi Ruslan. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephens P. 2001. *Perilaku Organisasi*, Edis Indonesia. Jakarta : Indeks.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. Joko. 2001. *Good Governance Telah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.

#### Peraturan Perundang-undangan :

- Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang- Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- Dokumen PPPA Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR PERTANYAAN

Tujuan : Mengumpulkan Data Dan Informasi Tentang Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru

Hari/ Tanggal :  
Identitas Informan :  
Nama :  
Usia :  
Pendidikan :  
Jabatan :  
Tempat :

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1.	Apa saja indikator dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ?	
2.	Bagaimana cara ibu/bapak mengidentifikasi masalah korban ?	
3.	Apa yang dilakukan setelah ada identifikasi tersebut ?	
4.	Apa langkah dinas setelah mengetahui adanya kekerasan ?	
5.	Apa prosedur yang akan dilakukan klien untuk melaporkan adanya kekerasan ?	
6.	Siapa saja pihak yang berhak ikut serta didalam melaksanakan konselor ?	
7.	Bagaimana bentuk kerjasama antara konselor dengan keluarga korban ?	
8.	Bagaimana cara konselor mengatasi/ solusi trauma akibat kekerasan tersebut ?	
9.	Apakah klien mengeluarkan biaya untuk meminta pelayanan ?	
10.	Jika iya, apa kegunaan biaya tersebut ? dan bagaimana bila klien tidak mampu membayarnya ?	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Fasilitas apa saja yang diberikan oleh dinas terhadap korban kekerasan ?	
2.	Berapa lama proses untuk melakukan konseling kepada korban ?	
3.	Apa kendala yang ditemukan saat konseling terhadap korban ?	
4.	Mekanisme penanganan seperti apa yang ditangani oleh dinas ?	
5.	Apakah ada perbedaan cara penanganan terhadap korban kekerasan ?	
6.	Bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan dinas ?	
7.	Keterlibatan pihak ketiga, seperti apa koordinasi ?	
18.	Pihak – pihak yang terlibat dalam kerjasama penanganan korban ?	
19.	Berbedakah setiap kerjasama penanganan tersebut ?	
20.	Batas penyelesaian masalah oleh pihak dinas seperti apa ?	





Lampiran

### Sop Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Langsung Di PPPA Kota Pekanbaru

Aktivitas	Pelaksana				Mutu baku		
	Staf Adm	Konselor	Wakil ketua	Sekretaris	Persyaratan dan kelengkapan	waktu	Output
Menerima pengaduan korban kekerasan dan mencatat dalam buku kasus.	√				Identitas diri korban dan Form Kasus	5 menit	Pengaduan diterima dan tercatat dalam form kasus
Mengisi form kasus dan mencatat kronologis kejadian dan upaya yang telah dilakukan oleh korban.	√				Form kasus	30 menit	Form kasus yang telah diisi
3. Mengidentifikasi kasus kekerasan dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan korban.	√				Berkas kasus	15-30 menit	Hasil identitas dan laporan
Menerima laporan hasil identifikasi			√		Hasil identitas dan laporan	30 menit	Keakuratan laporan
Menunjuk konselor			√		Hasil identitas dan laporan	-	Surat penunjukan konselor
Membuat draft SPT konselor	√				Surat penunjukan konselor	15 menit	Draft SPT Konselor
Mendatangi SPT konselor				√	SPT Konselor	15 menit	SPT konselor bertanda tangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

11.	Mempelajari Form kasus untuk menyiapkan assesment kebutuhan lanjutan	√			Hasil identifikasi dan laporan	-	Keakuratan Laporan
12.	Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban	√			Hasil identifikasi dan laporan	30 menit	Alternatif penanganan
13.	Menyampaikan informasi jenis pelayanan yang akan diberikan kepada korban	√			Alternatif penanganan	15 menit	Kesempatan penanganan
14.	Menyetujui dan menandatangani naskah kesepakatan layanan bersama korban	√			Naskah kesepakatan bertandatangan	10 menit	Naskah kesepakatan bertandatangan
15.	Membuat dan menandatangani laporan penanganan kasus kekerasan	√			Berkas penanganan	30-120 menit	Surat perjanjian
16.	Mendokumentasikan laporan penanganan kasus kekerasan	√			Laporan penanganan kasus	10 menit	Dokumentasi laporan penanganan kasus
17.	Pemantauan berkala pasca putusan	√			Dokumentasi laporan penanganan		

Sumber : PPPA Kota Pekanbaru, 2019.

UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



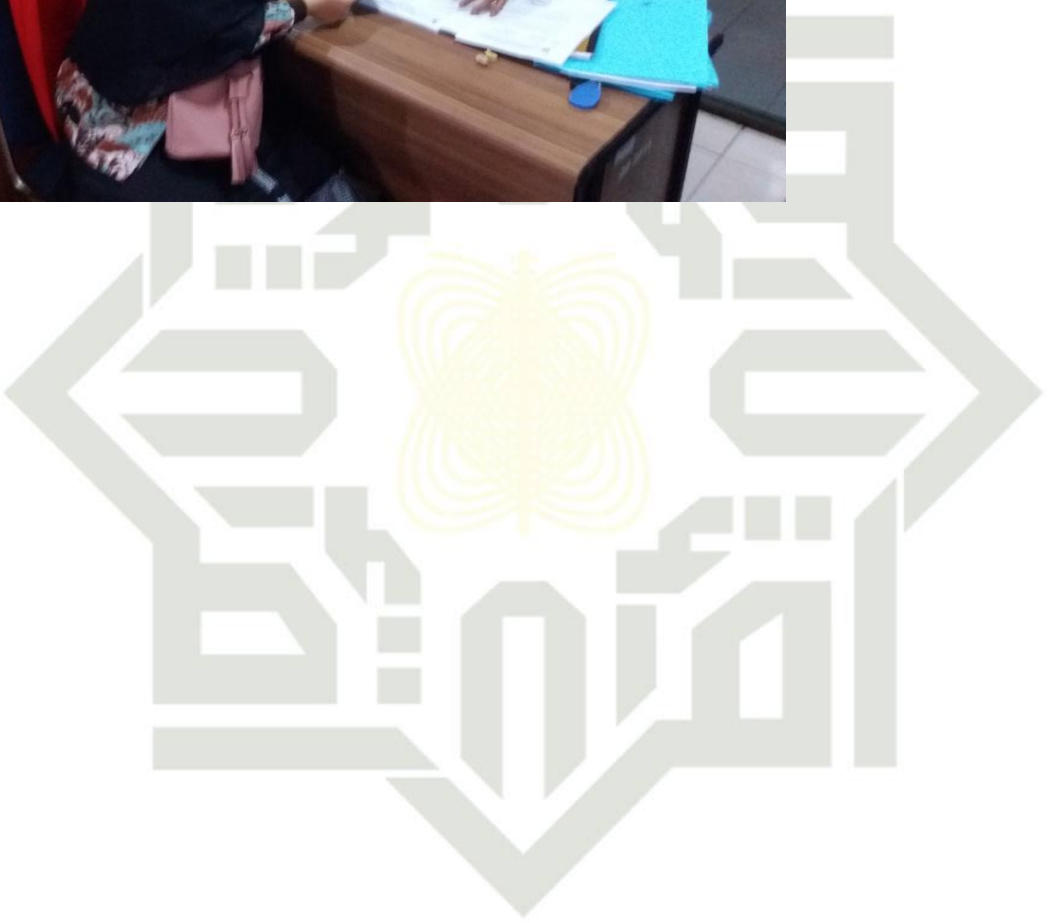
## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: tekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1651/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 21 Februari 2018 M  
5 Jumadil Akhir 1439 H

Kepada  
Yth. **Devi Deswimar, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Meiriani Zalisfa  
NIM : 11475205189  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Peran Dinas Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan  
**Devi Deswimar, S.P., M. Ed.**  
NIP. 1944119 200501 1 004

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5447/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 09 Oktober 2017 M  
18 Muharram 1439 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Meiriani Zalisfa  
NIM. : 11475205189  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  
Anak (P2TP2A) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan  
Anak di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru)" Untuk itu kami mohon  
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec  
NIP. 19711119 200501 1 004

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6002/2019  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Oktober 2019 M  
 14 Safar 1441 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

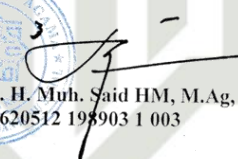
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Meiriani Zalisfa  
 NIM. : 11475205189  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : XI (Sebelas)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam  
 Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru"**  
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/27414  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6002/2019 Tanggal 14 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

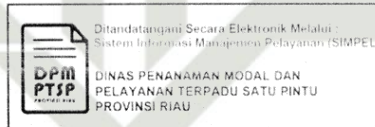
1. Nama	MEIRIANI ZALISFA
2. NIM / KTP	11475205189
3. Program Studi	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	S1
5. Alamat	SIAM
6. Judul Penelitian	ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal 4 November 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3218



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27414 tanggal 4 November 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **MEIRIANI ZALISFA**
2. NIM : 11475205189
3. Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **JL. SEROJA BLOK E NO. 10 BTN PERAWANG**
7. Judul Penelitian : **ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 November 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Pekanbaru

Sekretaris

**H. MAISISCO, S.Sos, M.Si**

NRP. 19710514 199403 1 007

**Tembusan :**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA PEKANBARU**  
 Jalan Dagang No. 78 Kp. Tengah Telp. (0761) 8400350 Fax. (0761) 8400351  
**PEKANBARU 28122**

SURAT KETERANGAN  
 NOMOR : 071/DPPPA-SEKRE/ 763 /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. MAHYUDDIN**  
 Nip : 19680618 199401 1 001  
 Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV b  
 Jabatan : Kepala Dinas PP-PA Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : MEIRIANI ZALISFA  
 NIM : 11475205189  
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA  
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru selama 2 (dua) bulan terhitung tanggal 20 September 2019 sampai dengan 20 November 2019 untuk memperoleh data dalam angka penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERAN UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperunya.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU**



**Drs. MAHYUDDIN**  
 Pembina Tk I / IV b  
 NIP. 19680618 199401 1 001

UIN SUSKA RIAU





## BIOGRAFI PENULIS

**Meiriani Zalisfa**, lahir pada tanggal 12 Mei 1996 di Pekanbaru. Putri dari Pasangan Amrizal Dan Sri Wahyuni. Merupakan anak pertama dari 4 ( empat ) bersaudara. Pendidikan formal penulis diawali dengan Taman Kanak-Kanak (TK) YPPI Perawang dan lulus tahun 2002, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Perawang Barat dan lulus tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 04 Perawang Barat. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tualang. Dan akhirnya keinginan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi tercapai setelah diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014. Kemudian penulis melaksanakan Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di BAPPEDA Kota Pekanbaru pada bulan Januari-Februari 2017. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Siak Kecamatan Mempura Desa Kampung Tengah Pada Bulan Juli-Agustus 2017. Pada Bulan Oktober 2019 Penulis Melakukan Penelitian Di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dengan Judul **Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru**” Di bawah Bimbingan Devi Deswimar S.Sos. M.Si Dan Dinyatakan Lulus Setelah Mengikuti Ujian Sidang Munaqasah (Oral Comprehensif) Pada Tanggal 26 Desember 2019 Dengan Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Administrasi Negara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.